

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian dari pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi wirausaha atau pekerja bebas di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis menggunakan program SPSS 25 yang didasari oleh teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini merupakan pengujian pengaruh antara tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen, dengan didasari data primer yang didapat dari kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu wajib pajak

orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi dan terkumpul, maka dapat diperoleh data yang menjelaskan persepsi responden terhadap penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Populasi dan Sampling

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan objek dan subjek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini 34.460 wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non probability sampling dengan menggunakan metode sampling insidental. Metode sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, atau berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data.

Pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin*, untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini dihitung dengan tingkat kesalahan 10% atau 0,1, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rumus Slovin } (n) = \frac{N}{1 + N(\text{Moe})^2}$$

$$n = \frac{34.460}{1 + 34.460(0,1)^2}$$

$$n = \frac{34.460}{345,6} = 99,71$$

Dibulatkan menjadi 100 responden

Keterangan:

n = Jumlah sampel minimal yang diperlukan

N = Jumlah populasi

Moe = *Margin of error*

Berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang digunakan pada penelitian ini minimal adalah 100 wajib pajak orang pribadi non karyawan (wirausaha atau pekerja bebas) di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

D. Operasional Variabel Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang didapat pengumpul data dengan mengajukannya secara langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang memuat seperangkat daftar pernyataan yang harus diisi oleh responden. Instrumen kuesioner digunakan untuk mendapatkan data variabel yang mempengaruhi empat variabel dalam penelitian ini yang terbagi menjadi satu variabel dependen dan tiga variabel

independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Variabel independen adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), dan Sanksi Pajak (X3). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh antara tiap-tiap variabel independen dengan variabel dependen. Adapun operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

- a. Definisi Konseptual

Menurut Rahayu (2017) kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap patuh serta sadar untuk pemenuhan perpajakannya. Hal ini tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham, serta berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dan hal ini sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *Self Assesment System*, yang menuntut keaktifan dari para wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena dengan sistem ini segala perhitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan peran fiskus hanyalah melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

b. Definisi Operasional

Menurut penelitian Asbar (2014), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal
- 2) Kepatuhan Material

Menurut Sugiyono (2017), Skala *Likert* ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala *Likert*, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator-indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan skala *Likert* yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

2. Variabel Independen (X)

a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

- 1) Definisi Konseptual

Menurut Rahayu (2017), sistem administrasi pajak modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan.

Jadi, modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan perbaikan atau penyempurnaan pada bidang administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi, sumber daya manusia, dan *good governance* yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan penerimaan negara.

2) Definisi Operasional

Menurut Purnami, Edy, dan I Nyoman (2017) untuk dapat menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan, yaitu:

- a) Restrukturisasi Organisasi.
- b) Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi.
- c) Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
- d) Pelaksanaan *Good Governance*.

Pengukuran variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan skala *Likert* yang berkaitan

dengan 5 (lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

b. Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

1) Definisi Konseptual

Menurut Rahayu (2017), pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan Pelayanan Umum.

Sehingga kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai suatu ukuran baik atau buruknya tingkat pemenuhan cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2) Definisi Operasional

Menurut Aryobimo dalam jurnal Caroko, Heru, dan Zahroh (2015), persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kualitas Interaksi
- b) Kualitas Lingkungan
- c) Hasil Kualitas Pelayanan

Pengukuran variabel kualitas pelayanan fiskus dengan menggunakan skala *Likert* yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

c. Sanksi Pajak (X3)

1) Definisi Konseptual

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2) Definisi Operasional

Menurut Arum dalam jurnal Savitri dan Elva (2017), indikator sanksi perpajakan meliputi:

- a) Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Kedisiplinan wajib pajak).
- b) Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran (Ketegasan sanksi pajak).

- c) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan (Keadilan sanksi pajak).
- d) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perpajakan).

Pengukuran variabel sanksi pajak dengan menggunakan skala *Likert* yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Tabel III.1
Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Subindikator	Sumber Indikator
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1. Aspek Kepatuhan Formal.	1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.	Asbar (2014)
			2. Tepat waktu dalam mengisi SPT.	
			3. Penyampaian SPT tepat waktu termasuk dalam kategori wajib pajak patuh.	
			4. Ketepatan waktu dalam menyetor pajak terutang.	
			5. Kesesuaian dengan prosedur perpajakan.	

		2. Aspek Kepatuhan Material.	6. Ketepatan dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 7. Tidak melakukan tunggakan pajak. 8. Kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir SPT. 9. Pembayaran kekurangan pajak dilakukan sebelum pemeriksaan. 10. Pengawasan yang dilakukan oleh KPP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	
2.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	1. Restrukturisasi Organisasi. 2. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi.	1. Konsep perpajakan modern dengan basis pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak. 2. <i>Fleksibilitas Account Representative</i> sebagai penghubung wajib pajak dalam penyampaian informasi. 3. Kemudahan dalam berkomunikasi terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak. 4. Perbaikan <i>business process</i> untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan	Purnami, Edy, dan I Nyoman (2017)

			kewajiban perpajakannya.	
			5. Kemudahan yang diberikan fasilitas pelayanan dalam mengurus pembayaran pajak secara online.	
		3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).	6. Penilaian terhadap sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas di KPP.	
			7. Penilaian wajib pajak terhadap sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai pajak.	
		4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> .	8. Penegakan kode etik pegawai yang secara tegas.	
			9. Adanya berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen.	
			10. Adanya pembentukan <i>complaint center</i> di masing-masing kanwil modern untuk menampung keluhan wajib pajak.	
3.	Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	1. Kualitas Interaksi.	1. Etika fiskus dalam berkomunikasi dengan wajib pajak.	Aryobimo dalam jurnal Caroko, Heru, dan Zahroh (2015)
			2. Kompetensi fiskus dalam berinteraksi dengan wajib pajak	
			3. Cara fiskus dalam menjelaskan mengenai	

			perpajakan kepada wajib pajak.	
		2. Kualitas Lingkungan.	4. Kelengkapan fasilitas yang disediakan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.	
			5. Kondisi kerapihan dan kebersihan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.	
			6. Cara berpenampilan para pegawai fiskus KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.	
		3. Hasil Kualitas Pelayanan.	7. Pelayanan dari fiskus yang berkeadilan dan tidak memandang status sosial.	
			8. Inisiatif fiskus dalam memberi pelayanan kepada wajib pajak.	
			9. Pelayanan yang efisien dan efektif.	
			10. Rasa nyaman dalam menyampaikan pendapat atau keluhan kepada fiskus.	
4.	Sanksi Pajak (X3)	1. Kedisiplinan wajib pajak.	1. Batas akhir waktu pelaporan SPT Tahunan.	Savitri dan Elva (2017)
			2. Kesiapan wajib pajak apabila diadakan pemeriksaan.	

	2. Ketegasan sanksi pajak.	3. Kesiapan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi pajak apabila tidak membayar atau kurang bayar.
		4. Kesiapan wajib pajak dikenakan sanksi pidana apabila memperlihatkan dokumen palsu.
		5. Ketegasan sanksi pajak dapat membuat wajib pajak patuh.
	3. Keadilan sanksi pajak.	6. Pemberian sanksi pajak kepada semua wajib pajak jika terlambat memenuhi kewajibannya.
		7. Dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak apabila kurang bayar.
	4. Kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.	8. Terlalu ringannya sanksi administrasi bagi pelanggar pajak.
		9. Kewajaran pengenaan sanksi 2% per bulan.
		10. Penerapan sanksi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan perhitungan data yang dilakukan setelah data dari seluruh sumber terkumpul. Analisis data menggunakan software berupa SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25. Teknik

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dengan analisis yang digunakan antara lain:

1. Uji Kualitas Data

Dalam pengujian validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara acak kepada 30 responden yang terdapat di PT. Menara Hijau, Jakarta Selatan. Peneliti memilih untuk melakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada tempat tersebut karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang persewaan ruangan kantor, sehingga banyak wajib pajak wirausaha dan pekerja bebas yang menyewa ruangan di perusahaan tersebut sehingga dapat dijadikan responden dalam uji reliabilitas dan validitas.

- a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Dalam penelitian ini validitas diukur dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable, uji validitas menggunakan korelasi bivariate (*pearson correlation*), dan pengujian menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) karena digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak terarah. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor atau nilai total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor atau nilai total (dinyatakan tidak valid).

Dalam uji valid ini aspek yang diteliti meliputi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2), dan sanksi pajak (X3). Tiap aspek yang diteliti memiliki masing-masing 10 item atau butir pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur.

Salah satu cara untuk menguji validitas adalah dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Apabila pengujian menggunakan SPSS maka pernyataan tersebut dapat di katakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini r_{tabel} menggunakan rumus $df=n-2$ didapatkan $df=30-2=28$, pada signifikansi 5% maka r_{tabel} adalah 0,361.

Tabel III.2
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Variabel	Butir Pernyataan	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Nilai Rtabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Y1.1	0,786	0,361	Valid
	Y1.2	0,816	0,361	Valid
	Y1.3	0,655	0,361	Valid
	Y1.4	0,770	0,361	Valid
	Y1.5	0,811	0,361	Valid

Pribadi (Y)	Y1.6	0,700	0,361	Valid
	Y1.7	0,626	0,361	Valid
	Y1.8	0,629	0,361	Valid
	Y1.9	0,653	0,361	Valid
	Y1.10	0,669	0,361	Valid

Sumber: SPSS 25, data diolah oleh penulis (2019).

Dari Tabel IV.7 menunjukkan bahwa 1 dari 10 pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), memiliki r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} . Maka, butir-butir pernyataan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pengukuran atau uji statistik selanjutnya.

Tabel III.3
Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan (X1)

Variabel	Butir Pernyataan	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Nilai R_{tabel}	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,757	0,361	Valid
	X1.2	0,822	0,361	Valid
	X1.3	0,550	0,361	Valid
	X1.4	0,543	0,361	Valid
	X1.5	0,485	0,361	Valid
	X1.6	0,690	0,361	Valid
	X1.7	0,557	0,361	Valid
	X1.8	0,873	0,361	Valid
	X1.9	0,569	0,361	Valid
	X1.10	0,779	0,361	Valid

Sumber: SPSS 25, data diolah oleh penulis (2019).

Dari Tabel IV.8 menunjukkan bahwa 1 dari 10 butir pernyataan dari variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Maka butir-butir pernyataan tersebut dinyatakan valid dapat digunakan untuk pengukuran atau uji statistik selanjutnya.

Tabel III.4
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Variabel	Butir Pernyataan	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Nilai Rtabel	Keterangan
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	X2.1	0,165	0,361	Tidak Valid
	X2.2	0,387	0,361	Valid
	X2.3	0,214	0,361	Tidak Valid
	X2.4	0,575	0,361	Valid
	X2.5	0,621	0,361	Valid
	X2.6	0,678	0,361	Valid
	X2.7	0,827	0,361	Valid
	X2.8	0,751	0,361	Valid
	X2.9	0,703	0,361	Valid
	X2.10	0,614	0,361	Valid

Sumber: SPSS 25, data diolah oleh penulis (2019).

Dari Tabel IV.9 menunjukkan bahwa 1 dari 10 butir pernyataan dari variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} . Maka butir-butir pernyataan tersebut dinyatakan valid kecuali pada butir X2.1 dan X2.3. Sehingga pernyataan X2.2, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8, X2.9, dan X2.10 dapat digunakan untuk pengukuran atau uji statistik selanjutnya.

Tabel III.5
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X3)

Variabel	Butir Pernyataan	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Nilai Rtabel	Keterangan
	X3.1	0,425	0,361	Valid
	X3.2	0,648	0,361	Valid

Sanksi Pajak (X3)	X3.3	0,752	0,361	Valid
	X3.4	0,773	0,361	Valid
	X3.5	0,750	0,361	Valid
	X3.6	0,627	0,361	Valid
	X3.7	0,488	0,361	Valid
	X3.8	0,631	0,361	Valid
	X3.9	0,581	0,361	Valid
	X3.10	0,519	0,361	Valid

Sumber: SPSS 25, data diolah oleh penulis (2019).

Dari Tabel IV.10 menunjukkan bahwa 1 dari 10 butir pernyataan dari variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} . Maka butir-butir pernyataan tersebut dinyatakan valid dapat digunakan untuk pengukuran atau uji statistik selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2016), uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas yang dilakukan adalah dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$.

Tabel III.6
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	>/<	Tetapan	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	10	0,887	>	0,70	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	10	0,865	>	0,70	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	8	0,838	>	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak	10	0,828	>	0,70	Reliabel

Sumber: SPSS 25, data diolah oleh peneliti (2019).

Berdasarkan Tabel IV.6 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang melebihi 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan adalah reliabel atau handal. Sehingga setiap item yang digunakan akan mampu mendapatkan data yang konsisten, apabila pernyataan itu diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban yang sebelumnya, sehingga variabel tersebut layak diukur.

2. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengen distribusi). Jadi, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan

data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi atau umum.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plots.

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tidak berdistribusi normal.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual, data yang tidak normal dapat terlihat normal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini uji normalitas dilengkapi dengan uji statistik menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebagai berikut.

- 1) Jika nilai tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 artinya mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.
- 2) Jika nilai tolerance $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 artinya mengindikasikan terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi, dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.

- 1) Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik *Scatterplots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan Uji Glejser, dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Jika signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

- 2) Jika signifikansi < 0,05 atau 5%, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Gujarati dalam buku Ghozali (2016) analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable independen (variable penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variable dependen berdasarkan nilai variable independen yang diketahui. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi wajib pajak badan terhadap penggelapan pajak

X1 = Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan

X2 = Kualitas Pelayanan Fiskus

X3 = Sanksi Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan

β_2 = Koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus

β_3 = Koefisien regresi sanksi pajak

e = Error

5. Uji Goodness of Fit

a. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan apakah model yang diuji sudah fit dan layak untuk diteruskan.

Menurut Ghozali (2016) untuk menguji hipotesis digunakan uji statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Quick look*, jika nilai F lebih besar daripada 4 pada derajat kepercayaan 5%. Maka, kita dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F_{tabel} , maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Rumus $F_{tabel} = (k ; n-k)$ dimana k adalah jumlah variabel independen (X) dan n adalah jumlah responden atau sample penelitian.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Nachrowi dan Hardius (2006), koefisien determinasi merupakan suatu ukuran penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang

terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.

$$Kd = r_{xy^2} \times 100$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r_{xy^2} = Koefisien Korelasi Product Moment

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat (Y) yang dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Lalu, bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2016), pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji Uji-t adalah jika jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan tingkat kepercayaan $< 0,05$ atau 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$

dapat ditolak bila nilai $t > 2$ (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima H_a , yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.